

**KEAMANAN MARITIM DAN EKONOMI BIRU:  
TRANSFORMASI EKONOMI KELAUTAN  
BERKELANJUTAN DI INDONESIA**



# **KEAMANAN MARITIM DAN EKONOMI BIRU**

**TRANSFORMASI EKONOMI KELAUTAN BERKELANJUTAN  
DI INDONESIA**

**PENYUNTING:  
HUMPHREY WANGKE**

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jakarta, 2021

Judul:  
Keamanan Maritim dan Ekonomi Biru:  
Transformasi Ekonomi Kelautan Berkelanjutan di Indonesia

Penyunting:  
Humphrey Wangke

xii + 134 hlm; 15,5 x 23 cm  
ISBN 978-623-321-126-0 (PDF)

*Copyrights* © 2021  
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang  
All rights reserved

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama  
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan  
Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2021  
YOI: 2021.39.59.2021  
Desain sampul: Anung H.

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jln. Plaju No. 10, Jakarta 10230  
Telepon: +62 (0)21-31926978, 31920114  
Faksimile: +62 (0)21-31924488  
Email: [yayasan\\_obor@cbn.net.id](mailto:yayasan_obor@cbn.net.id)  
Website: [www.obor.or.id](http://www.obor.or.id)

# KATA PENGANTAR

*Humphrey Wangke*

Pada bulan September 2018 para pemimpin dari 14 negara setuju membentuk Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Kelautan Berkelanjutan yang dimaksudkan untuk memanfaatkan momentum membangun sebuah model ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Dengan model ini, aspek perlindungan yang efektif, produksi yang terukur, dan kemakmuran yang adil diupayakan berjalan beriringan. Model ini hendak mengubah cara berpikir dan bertindak negara-negara di dunia, sekaligus ingin menginspirasi lahirnya kebijakan tingkat global yang akan mengkatalisasi transisi menuju tata kelola ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Tujuan utama dari model ini adalah membuat lautan lebih bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Keseimbangan di antara ketiganya ingin diraih dengan meningkatkan hubungan antara manusia dengan laut, menjembatani kesehatan dan kekayaan laut, bekerja sama dengan beragam pemangku kepentingan, memanfaatkan pengetahuan kelautan terbaru, dan mengembangkan agenda aksi untuk transisi ke ekonomi kelautan yang berkelanjutan.

Apa yang dicita-citakan oleh Panel tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kelautan secara berkelanjutan penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir dan ketahanan pangan, menjadikan laut sebagai sumber energi global, serta menjadi kawasan yang aman bagi lalu lintas perdagangan internasional. Sebanyak 90% perdagangan internasional diangkut melalui laut, dan satu miliar orang di negara berkembang bergantung pada kekayaan laut sebagai sumber utama protein hewani. Karenanya, eksploitasi sumber daya perikanan laut harus dicegah, dampak perubahan iklim harus dikurangi, kejahatan maritim harus ditanggulangi, agar tidak mengancam industri dan melemahkan ekonomi pesisir. Ancaman-ancaman itu akan mengurangi kesejahteraan masyarakat pesisir dan membatasi peluang berdirinya

industri maritim legal, yang pada gilirannya akan mendorong masyarakat setengah menganggur memasuki pasar gelap dan menjadi aktor kejahatan maritim transnasional.

Jika pemikiran konservasi akan meminimalkan kerusakan laut dan pendekatan ekstraktif bertujuan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan, maka model ekonomi kelautan yang berkelanjutan berupaya mengintegrasikan kedua pendekatan itu menjadi sebuah pola baru dalam pengelolaan kelautan yaitu konvergensi antara perlindungan yang efektif, produksi yang berkelanjutan, dan tercapainya kemakmuran yang merata. Proses transformasi ini bukan membiarkan laut begitu saja melainkan mengajarkan tentang bagaimana tata kelola laut secara bijaksana harus dilakukan, yaitu membangun masa depan yang lebih sejahtera dengan tingkat kesehatan laut yang baik, karena alam yang lebih terkelola dengan baik dan sumber daya yang terdistribusi lebih adil.

Pemikiran laut sebagai objek ekonomi telah bertransformasi menjadi laut sebagai bagian penting dari solusi atas permasalahan dalam pengelolaan laut secara global. Kemitraan baru perlu ditempa agar semua pihak yang berkepentingan mengambil peran konkret untuk mencapai pengelolaan laut dan masa depan yang berkelanjutan. Pilihannya bukan antara perlindungan laut atau produksi, melainkan secara bersama-sama membangun masa depan yang sehat dan sejahtera. Penangkapan ikan yang berlebihan atau menciptakan polusi, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Lebih buruk lagi, bila para pelaku secara lokal memperparah satu sama lain, dengan konsekuensi yang sangat besar bagi ekosistem. Tanpa tindakan pencegahan dan penegakan hukum, masalah ini dapat merugikan ekonomi lokal dan global.

Pengabaian dan penyalahgunaan laut serta dampak perubahan iklim global akan memperburuk kehidupan semua orang. Akan tetapi, komunitas yang secara historis kurang terwakili dan terlayani, termasuk perempuan, akan menanggung beban yang sangat besar secara tidak proporsional. Kelompok-kelompok ini paling rentan terhadap kerawanan pangan, hilangnya mata pencaharian, dan kenaikan permukaan air laut. Mereka juga yang paling mungkin menderita dari kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di laut, termasuk perdagangan dan penyelundupan manusia, kerja paksa dan pembayaran utang.

Dalam konteks memperbaiki kehidupan manusia, maka melindungi laut tidak berarti membiarkannya begitu saja. Namun, yang terpenting adalah mengelola aktivitas manusia dengan bijak agar dapat

melestarikan keanekaragaman hayati dan habitat kritis, memungkinkan laut untuk secara berkelanjutan menghasilkan manfaat yang lebih besar, dan melestarikan nilai budaya dan spiritual laut. Pengurangan atau pelarangan aktivitas manusia secara signifikan sangat diperlukan untuk memungkinkan ekosistem pulih dan beregenerasi. Di sebagian besar wilayah, praktik berkelanjutan diperlukan untuk memungkinkan laut memproduksi dan menjaga kesehatan laut tanpa harus mengabaikan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Sumber utama kerusakan ekosistem baik di laut lepas maupun perairan pesisir adalah *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*.<sup>1</sup> *IUU Fishing* dengan mudah bisa terjadi karena penegakan hukum yang lemah, kegagalan tata kelola, korupsi, dan institusi yang lemah. Kerusakan yang ditimbulkannya mengakibatkan kerugian ekonomi yang diukur dari laju degradasi sumber daya yang lebih cepat dan distribusi sumber daya yang tidak merata. *IUU fishing* telah menjadi ancaman terhadap keberlanjutan pengelolaan kelautan dan keamanan maritim. Maraknya kegiatan *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* di Indonesia, telah menimbulkan kerugian yang cukup besar, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan, sehingga kegiatan ini dapat dikatakan sebagai kendala utama bagi Indonesia dalam mewujudkan perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Keamanan maritim secara sederhana dapat diartikan sebagai tidak adanya ancaman terhadap pemanfaatan laut.<sup>2</sup> Kejahatan yang lahir di laut mulai dari pembajakan, penangkapan ikan ilegal hingga penyelundupan manusia, senjata, narkoba dan barang terlarang lainnya, terorisme, dan proliferasi senjata nuklir, merupakan ancaman terhadap kebebasan navigasi, risiko lingkungan, dan juga bencana. Keamanan maritim adalah ajakan untuk memikirkan keterkaitan antara ancaman-ancaman ini secara sistematis, dengan agenda lain seperti keamanan nasional, keamanan manusia, keselamatan laut, dan yang tak kalah pentingnya adalah pengelolaan ekonomi kelautan secara berkelanjutan atau ekonomi biru.

Keamanan maritim pada dasarnya penting karena menciptakan kondisi bagi berkembangnya ekonomi biru. Negara-negara harus

---

1 Asian Development Bank. *Economics of fisheries and aquaculture in the Coral Triangle*, Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2014, hlm. 149.

2 Christian Bueger, *Maritime Security and the Blue Economy: Understanding the Link*, WAPSN, 17 Maret 2016.

memiliki kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan dengan keberlanjutan sumber daya laut dengan memastikan bahwa tantangan keamanan maritim telah terkelola secara memadai dan terkendali. Konsep ekonomi biru merujuk pada sektor ekonomi dan lingkungan laut. Jika ingin mengeksploitasi laut, maka harus dilakukan secara berkelanjutan dan menjaga kesehatan lautan dengan baik. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (2015) menunjukkan ada gelombang baru industrialisasi laut, yang sejalan dengan penurunan kesehatan laut yang disebabkan oleh aktivitas manusia.<sup>3</sup>

Buku yang ditulis oleh para peneliti bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPRRI ini merupakan hasil penelitian di Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Bali. Hasil penelitian menunjukkan perlunya transformasi pengelolaan ekonomi kelautan mengingat masalah keamanan maritim telah berada dalam tingkatan yang sangat merugikan perekonomian bukan hanya Indonesia, melainkan juga di seluruh dunia. Kegiatan *IUU Fishing* bukan hanya dilakukan oleh nelayan asing tetapi juga oleh nelayan dan pengusaha Indonesia. Semuanya ini bisa terjadi karena lemahnya penegakan hukum, kurangnya kordinasi diantara lembaga negara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan di laut, dan kapal-kapal patroli yang masih mempunyai banyak kekurangan. Akibatnya, sebagian besar aktivitas perikanan nasional belum memperlihatkan kinerja yang optimal, berkelanjutan, dan menjamin kelestarian sumber daya ikan seperti yang diamanatkan dalam pasal 6 ayat 1 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Secara keseluruhan, bila dianalisis lebih jauh, tata kelola di laut akan berjalan baik bila dikaitkan dengan dua rangkaian aktivitas, yaitu *pertama*, tentunya koordinasi yang intensif di antara pemangku kepentingan baik di tingkat nasional, regional maupun global, mengingat persoalan di laut sangat kompleks, bersifat lintas sektoral, lintas yurisdiksi, dan bahkan lintas batas ngara. Dengan koordinasi yang intensif, undang-undang dan rencana aksi dapat disesuaikan. *Kedua*, perlu pemahaman yang sama tentang apa yang terjadi di laut sehingga kordinasi, terutama dalam informasi, menjadi faktor penting dalam kerja sama internasional sehingga bukan hanya apa kegiatan di laut, melainkan apa tantangan yang

---

3 The Economist Intelligence Unit, 'The Blue Economy: Growth, Opportunity and a Sustainable Ocean Economy', *The Economist Group*, London, 2015.

sebenarnya perlu ditangani bisa saling mengetahui. Dengan demikian, kepercayaan dan kebersamaan menjadi dasar keberhasilan.

Hasil lain dari penelitian ini menunjukkan, praktik-praktik pengamanan laut di Indonesia masih bersifat parsial, belum terkordinasi dengan baik, mengingat sedikitnya ada enam lembaga negara yang terkait langsung dengan keamanan maritim, yaitu TNI AL, Badan Keamanan Laut, Kepolisian Air dan Udara, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Pengawasan Sumber Daya Kelautan, dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Padahal, secara internasional kewenangan menjaga keamanan maritim berada di satu lembaga yang berfungsi sebagai *coast guard*. Harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi keharusan bila Indonesia ingin mempunyai satu lembaga yang khusus menangani keamanan maritim, selain TNI AL yang bertugas sebagai perangkat pertahanan negara. Dengan demikian, ke depannya, tugas pengawasan keamanan maritim yang melibatkan banyak lembaga di bawah satuan tugas 115 (satgas *illegal fishing*) tidak diperlukan lagi.

Semoga buku yang berjudul *Keamanan Maritim dan Ekonomi Biru: Transformasi Kelautan Berkelanjutan di Indonesia* ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca tentang pentingnya pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan berbasis kolaboratif di antara para pemangku kepentingan. Diharapkan juga, buku ini dapat menjadi inspirasi bagi peneliti dan akademisi untuk meneliti lebih jauh tentang kesungguhan dari negara-negara yang tergabung dalam *High Panel for Sustainable Ocean Economy* dalam mengimplementasikan komitmennya untuk melakukan transformasi pengelolaan sumber daya kelautannya dari yang ekstraktif menjadi berkelanjutan dengan mengarusutamakan kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi. Selamat membaca!

Penyunting,

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penyunting	v
Daftar Isi	x
Prolog	1
Bagian Kesatu	5
Keamanan Maritim dan Urgensi Kehadiran Bakamla dalam Pengamanan Wilayah Perairan Indonesia <i>Simela Victor Muhamad</i>	
Bab I Pendahuluan	7
Bab II Bakamla dalam Konsep Keamanan Maritim	13
Bab III Tantangan Keamanan Maritim Indonesia	18
A. Tantangan Laten dan Kontemporer	18
B. Masalah <i>IUU Fishing</i>	19
C. Penyelundupan Narkotika	22
D. Isu Keamanan Lain	24
E. Titik Kerawanan Keamanan di Laut	25
F. Dampak Sengketa Laut China Selatan	27
Bab IV Bakamla dan Keamanan Laut RI	29
Bab V Penutup	36
Daftar Pustaka	37
Bagian Kedua	41
Pengelolaan Laut Secara Berkelanjutan di Indonesia <i>Humphrey Wangke</i>	
Bab I Pendahuluan	43
Bab II Pembangunan Kelautan Berkelanjutan dan Keamanan Maritim	50
Bab III Pengelolaan Ekonomi Kelautan di Indonesia	59

A.	Sinergi Poros Maritim dan Ekonomi Biru	61
B.	Regionalisasi Ekonomi Biru dan Pergeseran Paradigma	64
C.	Pragmatisme Masyarakat	71
Bab IV	Kesimpulan	79
	Daftar Pustaka	81
	Ucapan Terima kasih	84
Bagian Ketiga		85
Tantangan terhadap Pengelolaan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan		
<i>Ziyad Falahi</i>		
Bab I	Pendahuluan	87
Bab II	Diskursus Ekonomi Kelautan	93
Bab III	Pencemaran Sampah Plastik	97
Bab IV	Proyeksi Ekonomi Kelautan Berkelanjutan	166
Bab V	Pelajaran dari Sulawesi Utara dan Bali	112
Bab VI	Penutup	121
	Daftar Pustaka	122
Epilog		126
Indeks		128
Biografi Penulis		133



# Prolog

*Arie Afriansyah<sup>1</sup>*

Keamanan maritim sangat penting untuk mendukung Ekonomi Biru. Banyak forum keamanan maritim telah menjadi pendukung utama konsep Ekonomi Biru. Ada dua interaksi utama antara Ekonomi Biru dan kepentingan keamanan maritim. Pertama, keamanan maritim adalah pendorong Ekonomi Biru, misalnya, melalui pengamanan rute navigasi, menyediakan data oseanografi penting untuk industri kelautan dan melindungi hak atas sumber daya dan aktivitas laut yang berharga di dalam zona yurisdiksi maritim yang diklaim. Kedua, peran keamanan maritim yang sering diabaikan dalam Ekonomi Biru, yakni dengan menjadi sumber pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Biru yang diperluas akan menciptakan permintaan yang lebih besar untuk kemampuan keamanan maritim. Pada gilirannya, hal ini akan memacu peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi kelautan. Ekonomi Biru bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kehidupan dan inklusi sosial tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan laut dan wilayah pesisir karena sumber daya laut terbatas dan kondisi fisiknya telah dirugikan oleh tindakan manusia.

Istilah “Ekonomi Biru” semakin menjadi komponen integral dari tata kelola laut (*ocean governance*) dalam bahasa sehari-hari selama dekade terakhir sejak kemunculannya di Konvensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (UNCSD) 2012 atau Konferensi Rio + 20. Ekonomi Biru muncul untuk mencerminkan fakta bahwa lebih dari 70% permukaan bumi adalah air. Lautan sangat penting untuk keberlanjutan global dan memainkan peran penyeimbang utama dalam iklim global sebagai penyerap utama untuk kelebihan panas dan karbon yang ada dalam sistem iklim global. Memang, lautan diakui sebagai area yang vital dan

---

<sup>1</sup> Center for Sustainable Ocean Policy, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

pendukung keanekaragaman hayati global. Pada saat yang sama, lautan juga merupakan sumber penting makanan, yakni dengan perikanan dan budi daya lautnya. Hal ini merupakan dasar bagi ekonomi global melalui perdagangan laut.

Konsep Ekonomi Biru telah secara khusus diperjuangkan oleh Pulau Kecil dan Negara Berkembang (*Small Island and Developing States - SIDS*) sebagai pengakuan atas yurisdiksi laut mereka yang besar dan pentingnya industri laut dan kelautan bagi ekonomi nasional mereka. Salah satu pertanyaan yang sering dimasukkan ke dalam diskusi Ekonomi Biru adalah berkaitan dengan ruang lingkup sektoralnya. Mengingat Ekonomi Biru sering dianggap sebagai bagian dari ekonomi kelautan, identifikasi dan penilaian segmen atau sektor yang membentuk ekonomi laut sering merupakan langkah pertama dalam proses perencanaan pengembangan Ekonomi Biru atau mengidentifikasi potensi peluang Ekonomi Biru. Masih ada pertanyaan tentang apa yang membedakan kelautan dan Ekonomi Biru dalam kaitannya dengan ruang lingkup sektoral. Namun, ada potensi di semua sektor untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan menumbuhkan manfaat sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan kelautan. Dalam hal ini, setidaknya, semua sektor memiliki kemampuan untuk menjadi lebih “Biru”.

Di sisi lain, keamanan maritim, sama dengan Ekonomi Biru, adalah istilah yang digunakan secara luas tetapi tidak didefinisikan dengan baik. Bueger (2015) mencoba mengidentifikasi empat kunci di mana istilah “keamanan maritim” dipahami, yaitu:

1. Kekuatan laut (*sea power*): peran tradisional badan keamanan maritim, khususnya angkatan laut, dalam melindungi negara, termasuk berpatroli dan melindungi jalur laut, zona maritim yang diklaim dan batas maritim yang dibatasi serta hak negara pantai di dalam ruang maritim ini;
2. Keselamatan laut (*marine safety*): mengatasi ancaman terhadap kapal dan instalasi dan aset maritim, termasuk menanggapi bencana dan kecelakaan maritim di laut dan berpartisipasi dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan;
3. Pembangunan ekonomi (*economic development*): menegakkan hukum dan peraturan terkait dengan penggunaan sumber daya di lautan, termasuk melawan pembajakan dan penyelundupan dan menyediakan lingkungan maritim yang aman yang memungkinkan dan mendukung pembangunan ekonomi;

4. Keamanan manusia (*human security*): dalam kaitannya dengan memastikan ketahanan pangan dan penghidupan yang berkelanjutan, dengan fokus khusus pada penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) dan perdagangan manusia.

Jika kita menguraikan satu aspek spesifik dari Ekonomi Biru dalam kaitannya dengan keamanan maritim, efek penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) oleh kapal asing diketahui berdampak pada perikanan yang berkelanjutan dan secara keseluruhan bagi masyarakat pesisir. Kejahatan maritim lainnya yang juga memiliki ancaman serius adalah pembuangan limbah beracun. Keduanya merupakan ancaman terhadap keamanan maritim, serta terhadap perdamaian dan keamanan secara keseluruhan. Namun, perlu ditekankan bahwa eksploitasi secara berkelanjutan dari domain maritim dapat bermanfaat secara ekonomis untuk negara-negara pantai. Peningkatan kerja sama antarnegara merupakan prioritas jika menginginkan domain maritim yang aman tanpa kejahatan transnasional seperti pembajakan, perdagangan manusia dan senjata ilegal, ancaman terorisme dan kejahatan lingkungan, termasuk eksploitasi sumber daya yang agresif.

Pengembangan ekonomi biru dan eksploitasi sumber daya hanya akan terjadi ketika sebagian besar ancaman terhadap wilayah maritim ini ditangani secara luas. Oleh karena itu, penting ke depannya adalah penerapan keamanan dan pemerintahan dalam intervensi ekonomi biru dan proyeksi tindakan negara di laut. Rezim hukum keamanan maritim dalam mengatur semua aspek kegiatan dan operasi domain maritim menjadi sangat dibutuhkan, terutama diperlukan ketika eksploitasi sumber daya maritim atau ekonomi biru dan pengembangannya sekarang lebih dari sebelumnya di wilayah tersebut.

Dalam dua tahun terakhir ini, munculnya Covid-19 telah memberikan dampak serius terhadap seluruh dunia, menekan ekonomi, menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. Namun, upaya bersama dalam mengurangi kejahatan maritim regional seharusnya tidak dikesampingkan pada saat ini. Dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 di wilayah yang rentan terhadap ancaman dapat menyebabkan penurunan perdagangan maritim dan meningkatnya gangguan terhadap keamanan.

Di saat literatur dalam bahasa Indonesia mengenai keterkaitan antara keamanan maritim dan ekonomi biru masih terbatas, kehadiran buku *Keamanan Maritim dan Ekonomi Biru: Transformasi Ekonomi*

*Kelautan Berkelanjutan di Indonesia* yang ditulis oleh para peneliti bidang Hubungan Internasional Puslit BK Setjen DPR RI tentu sangat memberikan kontribusi yang besar. Keunikan keadaan alam Indonesia khususnya dalam potensi sumber daya kelautan tentu sangat menggambarkan bagaimana ekonomi biru di Indonesia sangat memiliki harapan yang besar bagi perekonomian nasional. Akan tetapi, harapan tersebut tidak akan terwujud apabila keamanan maritim secara menyeluruh tidak diperhatikan secara serius baik dari sisi tata kelola kelembagaan dan penegakan hukum terhadap segala ancaman dan pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia.

Buku ini menawarkan pengetahuan yang komprehensif atas keterkaitan antara keamanan maritim dan ekonomi biru di Indonesia yang terbagi menjadi tiga bagian besar. Bagian pertama, membahas bagaimana Indonesia dari sisi tata Kelola kelembagaan keamanan maritim memerlukan kehadiran yang sentral dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bagian berikutnya, buku ini akan membahas bagaimana pengelolaan kelautan di Indonesia dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini tentunya dalam menunjang bagaimana ekonomi biru dapat dikembangkan untuk mendukung perekonomian nasional Indonesia. Terakhir, buku ini akan memberikan beberapa catatan atas tantangan yang akan muncul dalam pelaksanaan ekonomi kelautan yang berkelanjutan di Indonesia.

Semoga kehadiran buku ini akan memberikan khazanah pengetahuan yang lebih baik bagi semua pemangku kepentingan, terutama bagi para pengambil keputusan dalam mengembangkan ekonomi biru secara nasional yang kemudian didukung oleh kebijakan tata kelola dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia.

Depok, 13 Oktober 2021

## Epilog

Tidak dapat dipungkiri, sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) yang dikelilingi lautan, Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Potensi kelautan yang sangat besar itu, baik sumber daya perikanan maupun sumber daya kelautan lainnya, sudah selayaknya menjadi penggerak utama (*prime mover*) perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sejalan dengan konsep ekonomi biru (*blue economy*), dan juga dalam kerangka *Sustainable Ocean Solution*, potensi kelautan yang dimiliki Indonesia harus dikelola secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Itu artinya, potensi ekonomi kelautan Indonesia yang melimpah harus dimanfaatkan dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan, pada saat yang bersamaan, ekosistem kelautan Indonesia (yang berada di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia) harus dijaga kelestarian dan kualitasnya.

Upaya Indonesia untuk menyelaraskan pemanfaatan potensi ekonomi kelautan dengan pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan masih menghadapi tantangan. Dalam konteks keamanan maritim, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah masih terjadinya aktivitas ilegal yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara yang mengancam pengelolaan laut secara berkelanjutan, di antaranya adalah kegiatan *IUU fishing* yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dan juga domestik. *IUU fishing*, khususnya praktik penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing negara-negara tetangga di perairan ZEE Indonesia, seperti yang terjadi di Laut Natuna Utara, menjadi tantangan keamanan maritim yang paling serius bagi Indonesia karena sering terjadi (*most likely*).

Tantangan keamanan maritim lainnya yang perlu diwaspadai adalah penyelundupan narkoba, perompakan bersenjata, kecelakaan di laut, dan pencemaran laut. Pencemaran laut yang disebabkan oleh pembuangan sampah plastik (*marine debris*), yang kini telah menjadi isu global, merupakan persoalan serius yang harus ditangani bersama. Indonesia

merupakan penyumbang sampah plastik kelautan terbesar kedua setelah Tiongkok. Berbagai tantangan dan persoalan keamanan maritim yang dihadapi Indonesia tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena mengancam keamanan dan keselamatan maritim, termasuk mengancam kelangsungan ekonomi biru.

Untuk memperkuat strategi ekonomi biru dan memanfaatkan secara utuh potensi ekonomi lautnya, koordinasi lintas-sektor perlu diperkuat melalui *Sustainable Oceans Platform* tingkat tinggi. Dengan pendekatan ini, berbagai lembaga pemerintah dan para pelaku non-pemerintah harus mengambil bagian dalam koordinasi perencanaan dan implementasi kebijakan, memantau kemajuan, serta pertukaran pengetahuan dan praktik-praktik terbaik di lintas-sektor kelautan. Sementara itu, kelangsungan ekonomi biru juga perlu didukung oleh penegakan hukum yang kuat, terutama untuk menghadapi berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun lintas-nasional.

Untuk itulah Bakamla, sebagai institusi keamanan laut non-militer, yang memiliki tugas melaksanakan patroli keamanan dan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia perlu diperkuat kehadiran dan kewenangannya. Kehadiran Bakamla, selain difungsikan untuk melaksanakan pengamanan atas wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan dalam kerangka mendukung pengelolaan laut berkelanjutan, juga difungsikan untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem perairan Indonesia.

# Indeks

## A

Aan Kurnia, 27, 34  
Abu Sayyaf, 24  
Aceh, 22-23, 31  
Agenda Transformasi Menuju  
    Ekonomi Kelautan, 47-48  
Aktor Non-Negara, 11-15, 17-18, 21,  
    36, 126-128  
Alur Laut Kepulauan Indonesia, 8,  
    24, 113  
APEC Ocean Related Ministerial  
    Meeting, 60  
APMM, 27  
Archipelagic State, 113, 126  
AS, 26, 46, 68, 88  
Asep Budiman, 33  
Asia-Pasifik, 19, 60  
ASEAN, 14, 16, 27-28

## B

Badan Keamanan Laut, ix, 4, 8, 29,  
    46, 49  
Badan Narkotika Nasional, 22  
Badan Perencanaan Pembangunan  
    Nasional (BAPPENAS), 119  
Badan Sipil Keamanan Laut, ix, 4, 8,  
    29, 46, 49  
Bakamla, ix, 4, 8, 29, 46, 49

Bali, 8-9, 11-12, 23, 25, 33, 48, 63,  
    69-70, 73, 84, 109, 112, 115, 117-  
    121  
Barry Buzan, 13  
Batam, 11-12, 25-27, 30-32  
Bea dan Cukai, 10, 22, 49  
Bencana Maritim, 53, 56  
Bintan, 26  
Bitung, 33-34, 67, 77, 84, 113-117  
Blue Economy, viii, 44, 53-54, 57, 59-  
    60, 65-68, 89-90, 102, 126  
BNN, 22-23

## C

Cahaya Mulyana, 30  
cantrang, 92  
CAPT Russ Bowman, 16  
China Coast Guard, 17, 28  
Coast Guard, 9-11, 16-28, 30, 34, 36  
Coastal States, 16, 36

## D

Dafit Santoso, 25-27  
Deklarasi Djuanda, 87, 113  
Deklarasi Changwon, 65  
Deklarasi Xiamen, 60, 65  
*Destructive Fishing*, 8, 21, 32, 96  
*Destructive Fishing Watch*, 8  
Dinas Kelautan dan Perikanan, 12,  
    32, 49, 76

Donny Muhammad Faisal, 20  
Drug Trafficking, 16

## E

Ekonomi Biru, vii-ix, 1-5, 21, 53-56, 59-61, 63-67, 69-71, 79-80, 87, 89-90, 121, 126-127  
Ekonomi Hijau, 89  
Ekonomi Kelautan, v-x, 1-2, 4, 27, 43, 45, 47-48, 57, 59-62, 64, 66-79, 85, 88, 93-94, 110-111, 113, 115, 121, 126  
Ekosistem Perairan, 21, 31, 34, 127  
Eskalasi Konflik, 28

## F

Filipina, 9, 17, 20, 24, 28, 33, 45, 97, 113, 121  
Forum Maritim ASEAN, 16  
Frans Terok, 32, 70, 76, 84

## G

Global Fishing Watch, 20  
Global Coral Reef Monitoring Network, 99  
Gunter Pauli, 59, 90  
Gugus Keamanan Laut, 25

## H

Hadi Pranoto, 20, 27, 31-32  
Hanarko Djodi Pamungkas, 21, 24, 31, 33-34  
*hatchery*, 96  
*High Level Panel on Building Sustainable Ocean Economy*, 76  
Human Trafficking, 24-26, 31

## I

*Illegal Fishing*, ix, 7-8, 16, 18, 20-21, 25, 32-33, 57-58, 126

*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*, 45

Imigran Gelap, 9, 24  
Indonesia, viii-ix, 1, 4-5, 7, 5-11, 16-34, 36, 43-73, 75, 77, 79-81, 85-97, 106-107, 109, 112-121  
Indonesian Justice Initiative, 21  
Indo-Pasifik, 28  
Institute for European Environmental Policy, 98  
Iwan Kurniawan, 23

## J

Jepang, 17, 47, 66, 73  
Japan Coast Guard, 17  
J. Jakson Ewing, 13  
John Elkingto, 50  
Joko Susanto, 14, 18-19  
Juli Takaliuang, 32, 69, 84

## K

Kalimantan Utar, 26  
Kantor Kamla Zona Maritim Barat, 21, 27, 30-31  
Kantor Kamla Zona Maritim Tengah, 21, 30-34  
Kawasan Konservasi Laut, 72  
Kebijakan Kelautan Indonesia, 61-62, 87, 91  
Kelompok Masyarakat Pengawas, 70  
Keamanan Maritim, vii-ix, 1-5, 10, 13-16, 18-19, 27, 30, 36, 46-48, 50, 53-56, 113, 126-127  
Keamanan Non-Tradisional, 13  
Keamanan Tradisional, 13  
Kejahatan Lingkungan, 3, 53  
Kejahatan Maritim, v-vi, 3, 8, 54  
Kejahatan Lintas-Nasional, 18, 22  
Kepri, 22, 23  
Kepulauan Indonesia, 8, 24-25, 113

- Keselamatan Maritim, 16, 36, 127  
 Koarmada, 12, 25, 27  
 Komisi Bruntland, 51  
 KKP, 7, 34, 69, 84, 91-92, 95, 106-111  
 KN Belut Laut, 31  
 KN Bintang Laut, 31  
 KN Gajah Laut, 31  
 KN Kuda Laut, 31  
 KN Pulau Dana, 31  
 KN Pulau Nipah, 31  
 KN Pulau Marore, 31  
 KN Singa Laut, 31  
 KN Tanjung Datu, 31  
 KN Ular Laut, 31  
 KPLP, ix, 10, 12, 34, 75, 84
- L**  
 Landas Kontinen, 17-18  
 Laut Arafuru, 20  
 Laut Aru, 20  
 Laut Banda, 20  
 Laut Cina Selatan, 9, 27  
 LCS, 9  
 Laut Flores, 33  
 Laut Natuna Utara, 9, 11, 17, 25, 27-28, 31, 56, 126  
 Laut Sulawesi, 9-10, 20, 24, 33  
 Laut Sulu, 9, 24  
 Laut Teritorial, 10-17-18  
 Laut Timor, 20  
*Life Below Water*, 87  
 Likupang, 21, 115-116  
 limbah, 3, 26, 57, 90, 96, 98, 102-103  
 Lintas-Nasional, 11, 15-16, 18, 22-23, 36,  
 lobster, 70, 92, 95-96
- M**  
 Malaysia, 9, 17, 20, 24-28, 32-33, 40-41  
 Malaysian Maritime Enforcement Agency, 17  
 mangrove, 44-45, 68-69, 76, 88, 91, 109  
 Marine Debris, 97-98, 103-104, 118-119, 126  
*Marine Environmental Protection Committee*, 100  
*Maritime Security*, 13  
*Maritime Security Desktop Exercise*, 47  
*Master Plan of ASEAN Connectivity*, 64  
*Maximum Sustainability Yield*, 44, 84  
 Mely Caballero Anthony, 15  
 MT Freya, 8  
 MT Horse, 8
- N**  
 narkotika, 7, 9, 16-26, 53, 56, 126  
 Natural Capital, 51, 94  
 Negara Kepulauan, 7, 43, 87, 112-113, 126  
 negara maritim, 8, 112-113  
 negara pantai, 2-3, 16, 36, 47  
*nine dash line*, 99  
 Nusa Tenggara Barat, 26  
 Nusa Tenggara Timur, 26
- O**  
*Ocean and the Law of the Sea*, 16  
 Operasi Polisionil, 14  
 Operasi Militer, 14-15  
*Our Common Future*, 50, 53  
*Over fishing*, 94-95

**P**

Panama, 8, 114  
 Pangkalan Armada Batam, 31  
 Pangkalan Armada Serei, 21, 24, 31, 33-34  
 Pakistan, 23  
 PBB, 1, 16, 59-60, 87, 98-104  
 pembajakan, vii, 2-3, 15-16, 24, 36, 53, 55  
 pembangunan berkelanjutan, 1, 50-53, 57, 60-65, 71, 73, 87-88, 101  
 penangkapan ikan ilegal, vii, 3, 45, 47, 53, 56  
 penegakan hukum, vi-viii, 4, 10, 11, 14-18, 21, 34, 26, 34, 36, 58, 111, 127  
 penegakan kedaulatan, 11, 17, 36  
 pencemaran laut, 18, 76, 100, 117, 126  
 Pengelolaan Laut Berkelanjutan, 10, 32, 34, 116, 127  
 perompakan, 18-19, 24, 126  
 perdagangan orang, 24  
 Perserikatan Bangsa Bangsa, 87  
 perubahan iklim, v-vi, 43, 57, 61, 65, 70-71, 76  
 Peter Hough, 13  
 Philippine Coast Guard, 17  
 Polairud, 12, 70  
 Polri, 22-23  
 Poros Maritim Dunia, 61-63, 71, 87, 113, 116-117  
 Prabhakaran Paleri, 17  
 Proliferasi senjata, vii, 53  
 PSDKP, 10, 12, 20, 34, 49, 67, 70, 84, 119-120  
*Public-private partnership*, 64  
 Pulau Bali, 23  
 Pulau Halmahera, 20

Pulau Kalimantan, 25

Pulau Lihaga, 21

**R**

Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-pulau Kecil, 69, 128  
 Rencana Tata Ruang Wilayah, 63, 69, 75  
 Regional Fisheries Management Organization, 43  
 Retiono Kunto H., 31  
 Riau, 22, 48

**S**

Sabah, 24  
 Sabar Maima Hasugian, 34, 84  
 Samudra Hindia, 7-9, 20, 23  
 Samudra Pasifik, 7-9, 21-22, 112-113, 116  
*seaglider*, 7, 9  
*sea piracy*, 24  
*search and rescue*, 11  
 Selat Karimata, 20  
 Selat Lombok, 24-25, 33  
 Selat Makasar, 25-26, 32, 46  
 Selat Sunda, 24  
 Sembilan garis putus-putus, 9, 101  
*Singapore Police Coast Guard*, 17  
*Social Participation*  
 SPKKL 33  
 Suk Kyoon Kim, 16  
 Sulawesi Utara, 12, 21, 24-25, 31-34, 48, 63, 67, 69-70, 75-76, 84, 112-117, 121, 133  
 Sumber daya hayati, 3, 62, 93  
 Sumber daya nonhayati, 62  
 Sumber Daya Kelautan, v, ix, 4, 10, 20-21, 43, 49, 58, 63, 89, 91-92, 99, 107, 113

## Indeks

- Sumber Daya Perikanan, v, 20, 30, 32, 44, 99, 115, 119, 126
- Sustainable Development Goals*, 87, 100, 117
- Sustainable Oceans Platform*, 127
- Sustainable Ocean Solution*, 74, 117, 126
- T**
- Taiwan, 28
- tantangan kontemporer, 19
- tantangan laten, 18-19
- Teluk Cendrawasih, 20
- Teluk Tolo, 20
- terorisme, vii, 3, 18-19, 24, 53
- terorisme maritim, 53
- Tentara Laut Diraja Malaysia, 26
- Tiongkok, 7, 9, 14, 17, 19-20, 27-28, 43, 46, 61, 66, 68, 89, 91, 97,-98, 103-104, 127
- TNI Angkatan Laut, 10-11
- Tomasz Lukaszuk, 14
- Toni Ariadi Effendi, 23, 25, 70
- transnational crime*, 19
- Triple bottom line*, 50-51
- U**
- UNCLOS 1982, 9, 24
- United Nation Environmental Assembly* (UNEA), 100
- United Nation Environmental Programme* (UNEP), 100-104
- V**
- Vietnam, 17, 20, 25, 28, 45-46, 95, 97
- Vietnam Coast Guard, 17
- W**
- Wilayah Pengelolaan Perikanan, 20, 88
- Wilayah Perairan, 4-5, 17-30, 33-36, 69, 113, 117, 126-127
- Wilayah Yurisdiksi, 4, 7-11, 29-30, 34, 36, 47, 126
- World Commission on Environment and Development, 50
- WPP, 20
- Y**
- Yayan Sofyan, 25-27
- Z**
- ZEE, 9-11, 17-18, 20-21 24, 30, 46-47, 61, 106, 126
- Zona Ekonomi Eksklusif, 9-11, 17-18, 20-21 24, 30, 46-47, 61, 106, 126

## Tentang Penulis

**Dr. Humphrey Wangke, M.Si.**, menyelesaikan pendidikan S-1 Hubungan Internasional tahun 1988 di FISIP Universitas Jember dan pendidikan S-2 tahun 1998 pada Program Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Pada tahun 2018 menyelesaikan studi S-3 di Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: *Kerja sama Indonesia-Malaysia Dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017); "Solving the Problem of Illegal Logging through the Implementation of the Model of Partnership Between Balai TNK and the Local Community (The Case Study of Illegal Logging in TNK, East Kalimantan)", (*RJSSM*, 2017), *The Management of Kutai National Park through the Multistakeholder Partnership* (Atlantis Press, 2017); *Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018); "Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kemitraan Multistakeholder (Studi tentang Pengelolaan Ekosistem darat di Provinsi Maluku dan Sulawesi Utara)" dalam Humphrey Wangke (ed.), *Membangun Kemitraan Untuk Keberlanjutan Pembangunan* (Yayasan Obor, 2019); Pada tanggal 4-5 September 2019 di Denpasar, Bali, mendampingi Delegasi BKSAP DPRRI mengikuti Konferensi *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* (WPFSD) dengan topik "Combating Inequality Through Social and Financial Inclusion"; *Diplomasi Digital dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia* (Yayasan Obor, 2020); "Implications of United States-China Trade War to Indonesia", *International Journal of Business and Economics Research* 9 (3), 2020. Pemimpin Redaksi Jurnal "Politica" Puslit Setjen DPRRI (2019-sekarang). Dapat dihubungi melalui dhanny\_2000@yahoo.com.

**Ziyad Falahi, M.Si.** lahir di Bojonegoro 28 Oktober 1988, menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hubungan Internasional Universitas Airlangga

dengan predikat cumlaude pada tahun 2010. Dua tahun kemudian menyelesaikan Pendidikan S-2 Hubungan Internasional di Universitas Indonesia dengan predikat IPK tertinggi. Tahun 2008 pernah meraih juara pertama karya tulis ilmiah tingkat nasional. Sejak 2013 aktif mengajar sebagai dosen tidak tetap di beberapa kampus dan *resign* sejak 2016. Karya Tulis ilmiah yang sudah terbit diantaranya satu buah buku “desa cosmopolitan”, sepuluh jurnal ilmiah baik yang terakreditasi maupun belum terakreditasi, dan beberapa prosiding baik internasional maupun nasional. Publikasi ilmiah lainya juga telah tersebar di puluhan media massa cetak dan online. Sekarang ziyad falahi merupakan Calon Peneliti Pertama bidang hubungan Internasional di Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Ziyad Falahi dapat di hubungi di ziyad.falahi@DPR.go.id.

**Simela Victor Muhamad, Drs., M.Si.** Peneliti Ahli Utama Bidang Isu-isu Politik Strategis, Masalah Internasional dan Domestik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR-RI. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, pada 1986, dan Pascasarjana (S2) Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia, pada 1999. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain: “Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba ke Indonesia: Masalah dan Upaya Penanganannya,” dalam buku *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2017; “Peran Asian Parliamentary Assembly dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel,” *Jurnal Politica*, Vol. 8 No. 1, Mei 2017; “Indonesia dan Kerja Sama Internasional Penanggulangan Terorisme di Kawasan,” dalam buku *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2018; “Proxy War dalam Konflik di Lebanon,” dalam buku *Proxy War di Timur Tengah*, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2019.